

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Kita mungkin masih teringat dengan aksi tagar #2019ganti presiden yang mendapat kesuksesan besar dari opini publiknya. Kesuksesan ini telah menjadi angin segar bagi hadirnya gerakan politik untuk mempengaruhi massa dan menggoyahkan tatanan politik yang ada. Terlepas dari gagalnya Prabowo untuk menang di pemilu 2019 tetapi setidaknya telah menunjukkan dukungan yang progresif naik daripada sebelum adanya aksi tagar tersebut. Begitupun dengan aksi tagar lainnya seperti #GejayanMemanggil, #ReformasiDikorupsi, atau yang lainnya telah menunjukkan adanya potensi kuat atas pemanfaatan internet ini. Tentu pemanfaatan internet semacam ini tidak menutup kemungkinan untuk hadirnya aksi atau gerakan serupa dalam kehidupan masyarakat kita sesuai dengan kepentingan politiknya.

Nada positif ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Salter (2003, h. 137) bahwa *“the Internet is able to connect up many cultures and different experiences, increasing the likelihood of clashes of interest because given the interactive potential of Internet technology, such views are easily challenged and revealed for what they are”*. Internet telah mampu menghubungkan banyak budaya, pengalaman yang berbeda dan meningkatkan kemungkinan benturan kepentingan, sebab mengingat potensi dari teknologi internet. Boleh dikatakan bahwa era digital seperti yang kini

dialami telah memudahkan individu-individu dalam membangun koneksi dengan individu lain, khususnya dalam gerakan sosial.

Aksi tagar seperti yang telah dijelaskan diatas merupakan mimpi indah sebagai representasi realitas suara masyarakat yang tumbuh atas kesadarannya. Namun apakah benar demikian, atau sebenarnya merupakan bentuk dominasi wacana yang diproduksi oleh segelintir orang. Hal ini patut dipertanyakan atau bahkan dibenarkan jika memang ada dominasi wacana itu, sebab dalam pemanfaatan teknologi digital dalam gerakan justru menimbulkan masalah baru, terlebih dalam konteks gerakan kita hari ini telah terjadi kemadegan dalam banyak hal. Kemandegan gerakan terjadi karena gerakan yang dilakukan secara dalam jaringan (selanjutnya disingkat daring) tidak lagi efektif dan optimal jika dibanding secara luar jaringan (disingkat luring).

Tidak hanya dirasakan oleh organisasi gerakan, tetapi juga hampir oleh semua lini yang melaksanakan kegiatan secara daring. Dunia pendidikan misalnya, pembelajaran melalui daring telah menemui kemandekannya yang ditandai dengan adanya ketidakefektifan sistem belajar (dilansir Radar Jogja, 2021). Dalam dunia gerakan sendiri, penelitian Rohman (2019) mengonfirmasi kemandegan gerakan tersebut dengan menyebutkan bahwa gerakan daring kini tidak lagi seaktif dulu. Meski demikian, penelitian yang mengambil lokus gerakan sosial di Ambon, Rohman masih memiliki harapan bahwa dengan gerakan daring masih akan tetap eksis dengan segala kekurangannya (baca: kemandegan).

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (selanjutnya disingkat IMM) di Kota Semarang mempunyai cerita yang unik dalam menggambarkan problem ruang publik digital dalam gerakan. Klaim ini berdasarkan pada pengalaman empirik pribadi, dimana saya terlibat selama kurang lebih empat tahun di organisasi tersebut. Mereka gagal dalam menerapkan tindakan komunikatif pada ruang publik daring bahkan sejak proses pengorganisasian gerakan (tahap awal penting sebuah gerakan). Tidak hadirnya tindakan komunikatif oleh segenap kader IMM menyebabkan adanya ketidakefektifan dan ketidakefektifan sebagaimana yang dialami oleh kegiatan daring pada umumnya. Bututnya tentu sebagaimana yang diprediksikan, yakni mandeknya aktivitas gerakan.

Jika menilik implikasi ini secara teoritis, sebagai pengantar sebagaimana yang telah saya amati selama ini, kegagalan mereka dalam proses pengorganisasian gerakan daring di IMM tersebut mengalami sama dengan apa yang dikonsepsikan oleh Foucault. Michael Foucault (1980) melihat adanya gap antara rezim pengetahuan yang diproduksi oleh segelintir kader (baca: Pimpinan Cabang IMM Kota Semarang) dan kader lainnya yang notabenernya sebagai penerima wacana. Padahal, pada proses pengorganisasian, ruang publik yang komunikatif sangat dibutuhkan sebab ini merupakan satu tahap penting dalam konstelasi pergerakan. Secara *common sense* dapat dikatakan bahwa jika proses pengorganisasian gerakan saja telah mengalami kegagalan maka sangat memungkinkan jika proses pergerakan dalam bentuk aksi selanjutnya tentu akan menemui kemandulan.

Ini merupakan problem yang ditakutkan oleh sebuah organisasi gerakan, yakni mati sebelum bertanding.

Kondisi pandemi Covid-19 pun tampaknya memperparah kondisi gerakan IMM. Pinckney & Rivers (2020) mengonfirmasi kondisi ini dengan mengatakan bahwa sebagian besar strategi lama yang dilakukan oleh para aktivis gerakan selama pandemi mengalami peredupan dan perlu diadaptasikan ulang mengikuti kondisi pandemi ini. Tanda yang mellihatkan kondisi ini disebutnya karena para aktivis telah menjadi acuh tak acuh untuk mendukung gerakan, dan telah mengakibatkan turunnya minat pada pengadvokasian oleh para aktivis.

Dengan kemandekan ini, maka keefektivitasan dan keoptimalan gerakan IMM pun dipertanyakan, sama seperti kegiatan daring lainnya. Kemandekan gerakan IMM Kota Semarang telah berporos pada keadaan ruang publik yang tidak ideal dan dominasi wacana oleh, menggunakan istilah Foucault, rezim pengetahuan yang mempunyai kepentingan. Tanda yang paling memperlihatkan kemandekan ini adalah adanya kebungkaman kader dalam setiap agenda yang diselenggarakan secara daring oleh PC IMM Kota Semarang. Pengamatan saya melihat bahwa mereka (para kader lain, non-pimpinan cabang) cenderung bersikap diam, tidak menanggapi, atau justru lurus-lurus saja untuk megatakan sepakat tatkala ada wacana yang dilempar oleh PC IMM Kota Semarang (baca: rezim pengetahuan) dalam kegiatan yang diselenggarakan secara daring. Dengan itu, kemandekan gerakan menjadi ada karena terdapat jurang pembeda antara rezim itu sendiri, yang

memproduksi wacana dengan kader biasa yang bisa jadi tidak sesuai dengan kehendak mereka.

Melihat hal itu maka dalam penelitian ini setidaknya ingin memotret permasalahan tersebut dengan satu kalimat tanya, yakni: *mengapa bisa terjadi demikian?*. Setidaknya dengan kalimat tanya tersebut, peneliti berusaha untuk menelisik secara mendalam dan menggambarkan problem gerakan sosial pemuda pada pengorganisasian daring, khususnya IMM Kota Semarang.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat dua hal, yakni terkait koptasi lingkup studi, dan kosongnya lahan penelitian. *Pertama*, studi ilmu pemerintahan yang diselenggarakan di banyak kampus, selama ini masih memaknainya sebagai suatu studi yang berkutat pada hal-hal yang berkaitan dengan institusi pemerintahan, seperti: tata kelola negara, administrasi kelembagaan, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Hanya segelintir peneliti yang berani untuk *out of the box* dan itu pun jarang ditemui. Menimbang hal tersebut coba kiranya saya melihat hal yang baru untuk sedikit keluar melalui suatu celah dimana ilmu pemerintahan juga tidak hanya berbicara tentang yang memerintah, melainkan juga yang diperintah. Mereka yang diperintah punya basis kekuatan massa melalui sebuah organisasi atau hanya sebuah perkumpulan yang punya sensitivitas terhadap isu sosial-politik. Disinilah penelitian ini berfokus, yakni pada organisasi sipil yang selama ini kurang perhatian dari studi ini.

Kedua, melihat kekosongan pada seputar riset seputar kritik ruang publik atas analisa wacana kiritis. Pada umumnya kritik ruang publik dalam jaringan (daring, atau ruang publik digital) dengan analisa wacana kritis hanya melihat dalam skup yang luas, yakni pada praktik pertarungan relasi wacana dengan negara sebagai aktor yang berkuasa (baca: rezim pengetahuan). Penelitian (Sari & Siahainenia, 2015) misalnya, mereka mempraktikan kritik wacana terhadap ruang publik yang ideal ala Habermasian pada Twitter menggunakan kerangka konsepsi Fraser. Meski tidak menggunakan kerangka analisa wacana Foucault, mereka berhasil menunjukan adanya gap atas relasi kuasa dalam ruang publik digital tersebut. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2016), ia berhasil mengungkap eksistensi ruang publik digital dalam media daring dalam skup kecil (komunitas) tetapi tidak menggunakan analisa yang bersifat politis. Dapat dikatakan bahwa yang dilakukan Wahyuni kurang menyentuh aspek terpenting dalam komunikasi ruang publik, yakni adanya relasi wacana antar pelaku komunitas. Kurangnya kajian yang melihat relasi wacana dalam ruang publik digital serta dalam skup yang lebih kecil, maka peneliti disini tertantang untuk membedahnya, khususnya dalam dunia pengorganisasian gerakan.

Dalam penelitian ini saya tertantang untuk memotret kekurangan kajian tersebut dalam suatu organisasi gerakan, yakni IMM Kota Semarang, pada proses pengorganisasian. Tak hanya hendak menganalisa relasi kuasa dalam wacana pengorganisasian daring, namun perlu juga rasanya untuk

memberikan solusi-solusi untuk membangun seperti apa taktik strategis yang perlu digunakan untuk membangun kembali ruang publik ideal dan dapat terlepas dari permasalahan. Ini perlu jawaban, tidak hanya membeberkan sebuah masalah tanpa ada jalan keluar. Dengan hal itu penelitian ini dapat berguna untuk memberi refleksi bagi gerakan sosial lain serta merekonstruksi pola pengorganisasian yang tepat, khususnya pada pengorganisasian daring.

Serta yang terpenting adalah, dimasa sulit pandemi Covid-19, penelitian ini sangat memungkinkan untuk membantu menjawab pertanyaan yang kiranya permasalahannya kurang lebih sama dialami oleh organisasi lainnya. Dengan hal itu dunia pergerakan akan selalu mengalami pembaharuan gerakan, tidak terkungkung pada pola lama yang justru tidak sesuai dengan realitas dan memenjarakan kader sampai menjadi objek yang tersisihkan (tersubjektifikasi).

1. 2 Rumusan Masalah

Jika kemandekan gerakan dimaknai dalam analisa wacana kritis, maka dalam konteks penelitian ini adalah sebab dalam ruang publik digital tidak terlepas dari adanya kuasa rezim pengetahuan sebagai pewacana yang mempunyai kepentingan. Rezim pengetahuan, khususnya dalam pengorganisasian gerakan daring, tentu menimbulkan jurang antara kuasa itu sendiri (sebagai rezim pengetahuan yang memproduksi wacana dalam gerakan daring) dengan kader (anggota biasa) yang tidak selalu memiliki wacana yang sama dengan mereka. Bahkan akan timbul hadirnya dominasi

dalam sebuah wacana dan mereka yang terpinggirkan. Dengan alasan tersebut, peneliti akan menguak dunia gerakan pada skup yang spesifik, yaitu pengorganisasian gerakan daring dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Semarang. Terdapat satu pertanyaan pokok yang akan dijawab dalam penelitian ini, yakni: mengapa terjadi kemandekan gerakan sosial mahasiswa di era digital?

1.3 Tujuan Penelitian

Satu pertanyaan dalam penelitian ini setidaknya ingin mencoba menggugat konsepsi ruang publik habermasian dengan menggunakan analisis wacana kritis terhadap relasi kuasa dan pengetahuan. Hal ini akan memperlihatkan praktik kuasa yang merupakan hal yang tidak bisa dikompromikan dalam konsepsi ruang publik, khususnya dalam pengorganisasian gerakan daring. Selanjutnya secara perlahan akan mencoba memahami pola pikir masa hari ini dalam ruang publik digital sesuai keresahan Baudrillard dalam simulakra, dan menelaah praksis sosial Bourdieu sebagai jalan untuk mengonstruksi ulang eksistensi ruang publik kita hari ini.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna bagi akademisi yang ingin memahami suatu pola gerakan sejak dalam proses pengorganisirannya yang ada dalam skup atau lingkungan lain sebagai bahan referensi. Jikalaupun digunakan untuk hal

yang praktis, penelitian ini lebih bermanfaat karena dapat menjadi bahan refleksi bagi para aktor pergerakan bahkan dapat diadopsi dalam suatu eksperimentasi gerakan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Sebelum beranjak untuk melakukan penggalan untuk memotret mengapa terjadi kemandekan gerakan, peneliti disini ingin mendudukan beberapa hal yang kiranya itu bersifat teoritis. Hal ini bertujuan menyelaraskan antara pembaca dengan maksud peneliti. Sehingga akan ada berkesinambungan persepsi dalam membaca analisa yang akan dipaparkan kemudian.

1.5.1 Gerakan Sosial

Jika mencoba menelisik tentang apa itu gerakan sosial, maka kiranya kita akan menemukan definisi tersebut secara baik. Cable (2017, h.186) mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu jejaring individu, kelompok, dan/atau organisasi yang terbangun atas visi dan identitas bersama untuk menantang dan berinteraksi terhadap targetnya, menggunakan cara aksi yang konvensional maupun non-konvensional, serta berupaya untuk mencapai tujuan (*goals*) gerakan tertentu. Dari pendefinisian tersebut, kiranya gerakan sosial telah terbagi dalam tiga elemen sebagai sintesa konsekuensial yang inovatif. Tiga elemen tersebut menurut Tilly, Castañeda, & Wood (2020, h. 6) yakni gerakan sosial kampanye, gerakan sosial repertoar, dan gerakan sosial yang menampilkan WUNC (*Worthiness, Unity, Numbers and Commitment*). Gerakan sosial kampanye merupakan upaya publik guna

membuat klaim kolektif mereka atas otoritas sasaran secara berkelanjutan dan terorganisir. Sedangkan gerakan Sosial repertoar, merupakan kombinasi dari beberapa bentuk tindakan politik, seperti: pembentukan asosiasi dan koalisi yang bertujuan khusus, pertemuan publik, proses yang dihayati, kewaspadaan, unjuk rasa, demonstrasi, mendorong petisi, pernyataan sikap ke media publik, dan pamflet. Adapun gerakan sosial yang menampilkan WUNC (*Worthiness, Unity, Numbers and Commitment*) merupakan gerakan dimana representasi publik bersama peserta berangkat dari nilai-nilai WUNC seperti: kelayakan, persatuan, kesatuan anggota (dalam jumlah), dan komitmen di pihak mereka sendiri.

Salah satu contoh yang menerapkan tiga elemen tersebut, dalam sebuah studi kasus, Women's March Indonesia oleh Widiawati (2018) disebut sebagai wujud yang sesuai dengan tiga elemen diatas. Elemen kampanye misalnya, gerakan tersebut memulai kampanye dengan melakukan *pre-event* yang dirangkai hingga aksi puncak, *long march*. Sedangkan elemen repertoar diwujudkan dengan adanya penggalangan dana, membuat petisi, membuat pertemuan, hingga membuat pernyataan pers di berbagai media. Adapun elemen WUNC, ditunjukkan dengan adanya sejumlah partisipan, publik figur, formasi gerakan, dan pengorbanan yang tanpa pamrih. Tentu itu adalah satu contoh dari berbagai suatu yang dinamakan gerakan sosial.

Dalam proses terwujudnya aksi dalam gerakan sosial, pengorganisasian gerakan merupakan satu aspek penting yang menjadi basis awal dari serangkaian langkah untuk mencapai *goal setting*. Adapun

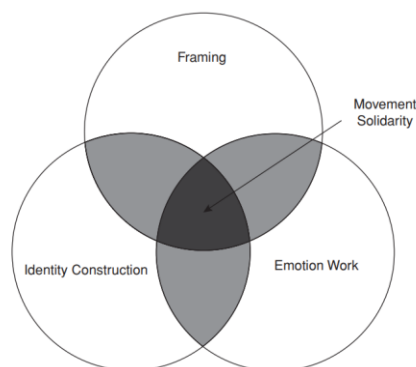
sekelumit dari Bakker, Hond, & Laamanen (2017) menyatakan bahwa pengorganisasian gerakan adalah:

“...a resource for movements, the picturing of social movement organizations as complex, formal organizations, characterized as bureaucratic in terms of ‘record keeping, decision-making procedures, and division of labor, has created the seeds for prolonged and oftentimes heated debates...” (Bakker dkk, 2017, h.204)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa pengorganisasian dalam gerakan sosial merupakan proses sebuah inti gerakan, dimana di dalamnya terdapat sebuah kerja administratif, proses pengambilan kebijakan, pembagian wewenang, serta perdebatan. Tujuannya tentulah jelas, yakni untuk membangun solidaritas antar aktor gerakan yang terbentuk dari kesepakatan sebuah bangunan identitas, *framing*, dan *emotion work*.

Gambar 1.1.

Komponen Solidaritas Gerakan



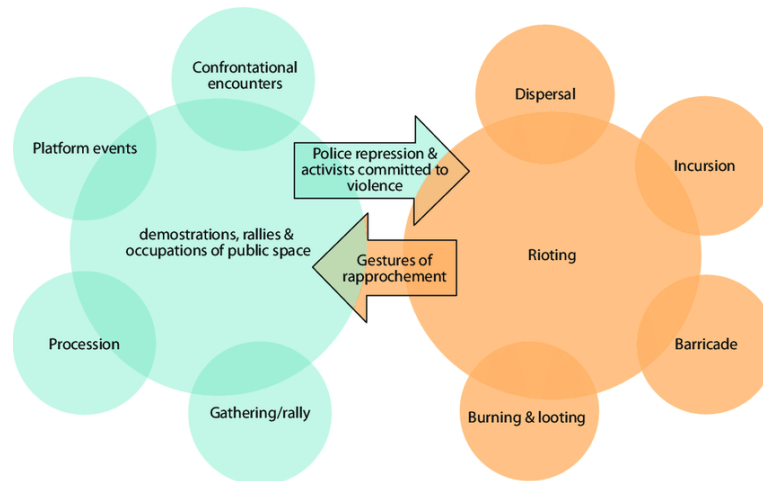
Sumber: Tarrow (2011, h. 143)

Konstruksi identitas itu terkait persamaan dan perbedaan atas aspek yang melekat dalam sosial dan personal individu. Pembingkaiian (*framing*) sendiri terkait persepektif bagaimana seseorang melihat sebuah peristiwa. Sedangkan *emotion work* itu terkait pengelolaan perasaan diri terhadap hubungan sosial. Singkatnya dari ketiga komponen tersebut harus diwujudkan dan dipertahankan dalam satu frekuensi keanggotaan gerakan agar tercapai persatuan yang kokoh bagi hubungan antar individu aktivis serta gerakan itu sendiri.

Termasuk dalam sebuah proses terwujudnya aksi gerakan yang perlu diperhatikan yakni siklus yang selalu berputar, dimana siklus tersebut berdasar fluktuasi kondisi aktivitas gerakan sosial itu sendiri. Dalam hal ini, Sidney Tarrow (2011, h.199) menyebutnya sebagai *cycle of contention*. Siklus ini merupakan hasil pengamatannya terhadap pola gerakan yang selalu berubah pada beberapa periode abad 18 di Eropa. Siklus ini diasumsikan sebagai sebuah fase meningkatnya konflik antar sistem sosial, yakni para penentang (baca: aktivis sebagai aktor gerakan sosial) dan rezim otoritas yang dapat berakhir dengan represi, reformasi, atau bahkan revolusi. Siklus tersebut bisa saja dimulai tatkala rezim otoritas dirasa rentan terhadap perubahan sosial selaras dengan tuntutan massa yang meningkat, dengan cara peleburan aksi kolektif dan memobilisasi, membuat inovasi dalam melawan, membangun kerangka baru, berdampingan dengan yang terorganisir dan yang tidak terorganisir, dan meningkatkan interaksi antara penentang dan rezim.

Gambar 1.2.

***Cycle of Contention*¹**



Sumber: Dimitris Kitis & Milani (2015)

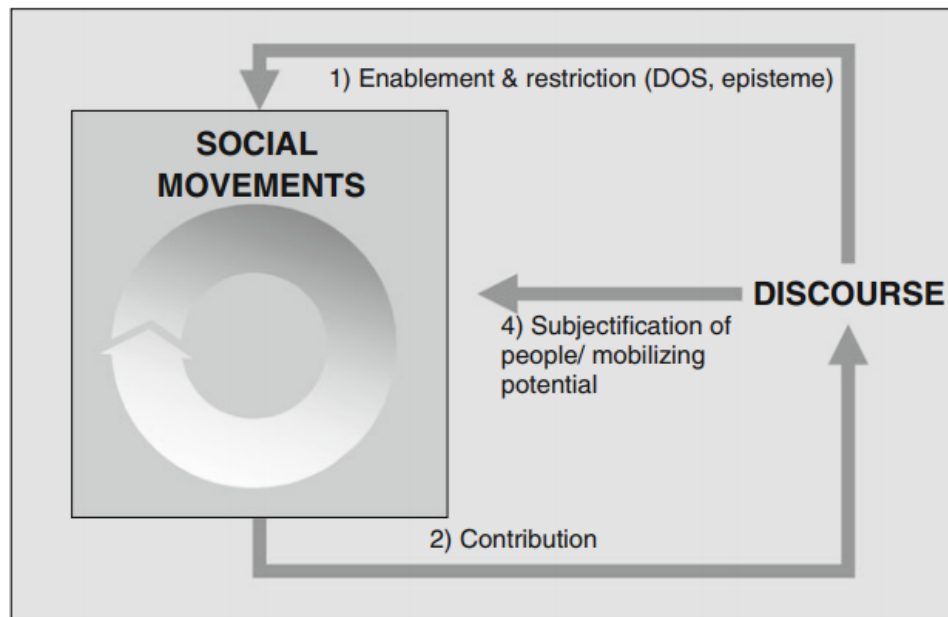
Tetapi dalam suatu analisa diskursus Foucault, terdapat hal yang membedakan apa yang membentuk suatu gerakan sosial, yakni diskursus itu sendiri. Baumgarten & Ullrich (2016, hal.14-16) memetakan pemikiran Foucault yang secara garis besar bahwa gerakan sosial, baik dalam proses awal hingga aksi, tidak terlepas dari konteks diskursus. Setidaknya dalam pembentukan gerakan sosial terdapat empat proses yang melingkar yang membentuknya (lihat gambar 1.4). Pertama, diskursus yang dimaknai sebagai ruang untuk membentuknya gerakan sosial dengan cara membatasi dan membentuk paradigma yang spesifik (episteme). Kedua, dengan adanya pembatasan yang umum dalam sebuah paradigma individu gerakan (atau

¹ Coba perhatikan. Meski tidak sama persis dengan yang disebutkan Tarrow, tetapi gambar siklus yang tertera merupakan hasil kontekstualisasi yang sama secara substansi sebagaimana yang telah disebutkan Tarrow.

bingkai/frame gerakan) dapat memberikan kontribusi berupa tuturan atau

Gambar 1.3.

Proses Diskursus dalam Pembentukan Gerakan Sosial



Sumber: diambil dari Baumgarten & Ullrich (2016, hal.15)

ide ataupun pemikiran yang mewarnai arena dan keperanan dalam suatu ruang diskursus. Ketiga, pola ini selanjutnya dapat dilihat sebagai seperangkat keteraturan diskursus yang produktif dan terbatas melalui praktik komunikasi yang bersumber pada pengetahuan (*knowledge*) yang dikuasai. Dan keempat, diskursus dan praktik-praktik lainnya membentuk subjektivitas massa dimana mereka membentuk relasi individu terhadap dirinya sendiri. Dalam buku berjudul *Discipline and Punish: The Birth of Prison*, pandangan Foucault atas pendisiplinan ini dapat kita pahami bahwa pendisiplinan

bukanlah suatu cara kuasa berja melalui represi maupun dominasi, melainkan melalui kombinasi regulasi dan normalisasi. Regulasi adalah sebuah *“penetration... into even the smallest details of everyday life through the mediation of the complex hierarchy that assured the capillary functioning of power;”* (Foucault, 2019, tanpa halaman). Sedangkan normalisasi adalah upaya kuasa memaksakan atau merekayasa adanya homogenitas, dimana dari individu (*the body*) tersebut memungkinkan untuk rezim mengukur kesenjangannya, menententukan level determinasi, guna memperbaiki perbedaan, dan membuat pembeda guna menyesuaikan satu dengan yang lain.

Adapun normalisasi ditunjukkan kepada mereka yang anti kuasa, sebab dalam konteks kuasa akan selalu memunculkan implikasi anti-kuasa. Mereka, yang anti kuasa, kemudian memunculkan sikap berupa resistensi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Alan Sheridan, seorang penerjemah Foucault, bahwa *“Where there is power, there is resistance, not in the sense of an external, contrary force, but by the very fact of its existence.”* (Sheridan, 1980, h.183). Pergulatan antara yang kuasa dan yang anti-kuasa tersebut akan selalu berlangsung dalam sebuah mekanisme produksi diskursus (baca: suasana diskursif). Alhasil, semua ini akan selalu ada dan menunjukkan bahwa wacana dalam gerakan sosial bukanlah sesuatu yang pasti dipunya, didapat, digunakan, atau diberikan sebagai sesuatu yang digenggam, melainkan bisa juga lenyap selaras dengan dijalankannya relasi yang terus bergerak.

1.5.2 Gerakan Sosial di Era Digital

Dalam konteks zaman sekarang yang telah terdigitalisasi, logika dalam gerakan sosial tidak lagi menyangkut aksi kolektif, tetapi telah merambah ke aksi konektif sebagai pelengkap dari sebuah logika gerakan sosial kontemporer (bukan pengganti). Bennett & Segerberg, (2013, h.33-36) dalam buku bertajuk *The Logic of Connective Action: : Digital Media and the Personalization of Contentious Politics*, memberikan panjang lebar pemaparan terkait logika tersebut. Adapun poin utama yang menjadi karakteristik dalam logika ini antara lain yaitu: *Pertama*, adanya partisipasi politik dalam ruang maya selaras dijalankan melalui logika connective action, dimana logika ini berbeda dengan logika *connective action* pendahulunya, Mancur Olson². Dalam pemikirannya, Bennett & Segerberg menjelaskan bahwa logic of connective action tidak memerlukan komitmen dalam sebuah kelompok yang terorganisir. Tetapi, yang menjadi perekat antara individu (bukan anggota) adalah preferensi individu (personal) yang sama.

Kedua, partisipasi politik dalam media menyerupai ekspresi individu, bukan melainkan ekspresi atau aksi kelompok. Memang terdapat tanda yang menunjukkan sebuah aksi terhadap suatu isu, tetapi pemaknaannya dapat saja berbeda-beda. Artinya, dalam logika ini terdapat koneksi, meski pandangan, narasi, serta makna yang dihadirkan personal bisa sangat berbeda,

² Dalam pemikiran Olson, Logika connective action diasumsikan bahwa seorang individu hendak bergabung dalam upaya kolektif apabila individu tersebut memiliki lebih banyak insentif daripada sumber daya (cost) yang harus ia keluarkan. Maka kiranya sebuah tindakan kolektif harus memiliki hierarki, strategi, keterikatan anggota, penanaman identitas dan ideologi kolektif, yang semua itu terkordinasi dengan baik. Hal ini berkebalikan dengan pemikiran Bennett & Segerberg.

tergantung kepentingannya. *Ketiga*, komunikasi dalam jejaring menjai pokok dalam pengorganisasian yang dilakukan dalam ruang digital (baca: daring), yakni menggantikan peranan struktural hierarkis pimpinan dan anggotanya. Singkatnya, logika aksi konektif ini adalah aspek terpenting untuk berperan dalam hiruk-pikuk gerakan sosial di era digital.

Tabel 1.1.

Perbandingan Logika dalam Aksi Gerakan

<i>Connective Action</i> (jejaring yang memungkinkan adanya kerumunan)	<i>Connective Action</i> (jejaringan yang diaktifkan secara organisasi)	<i>Collective Action</i> (jejaring yang diperantarai secara organisasi)
- Sedikit atau tidak ada koordinasi organisasi formal dalam aksi - Akses pribadi skala besar ke teknologi sosial berlapis-lapis - Komunikasi lebih pada tindakan pribadi - Ekspresi pribadi dibagikan melalui jejaring sosial - Jaringan massa mungkin menghindari keterlibatan organisasi formal yang ada	- Koordinasi yang longgar - Organisasi menyediakan pengeluaran teknologi sosial - Konten komunikasi berpusat pada tindakan inklusif pribadi - Beberapa moderasi organisasi untuk ekspresi pribadi melalui jejaring sosial - Organisasi di latar belakang dalam jaringan yang terhubung secara longgar	- Koordinasi aksi organisasi yang kuat - Teknologi sosial digunakan untuk mengelola partisipasi dan mengkoordinasikan tujuan - Konten komunikasi berpusat pada aksi kolektif - menekankan pada jaringan antarpribadi untuk membangun hubungan kolektif - Organisasi di latar depan sebagai koalisi dengan perbedaan yang dijembatani melalui perantara organisasi sumber daya tinggi

Sumber: diolah dari Bennett & Segerberg (2013, h.49)

Dalam menganggapi suatu isu, melalui logika aksi konektif, setidaknya para aktivis dapat melakukan beberapa hal yang kiranya itu berpotensi mereka lakukan terkait sikap. Adapun beberapa sikap yang memungkinkan untuk para aktivis lakukan dalam dunia digital menurut Rucht (dalam Cable, 2017, h.190) yakni seperti: abstain, berupaya menyerang, beradaptasi, atau menjadikan era digital ini sebagai alternatif gerakan. Poin terakhir terkait alternatif, ini sejalan dengan pandangan tiga ilmuwan politik sebagaimana dikatakan sebagai berikut:

“in loosely structured networks of social movement participants that deliberately eschew formal organizations’. Alternatively, they ‘have become interested in online activism, which may be possible without traditional social movement organizations.” (Bakker dkk., 2017, h.204-205)

Singkatnya, dalam pengorganisasian yang dilakukan secara digital (atau daring) dapat dimaknai sebagai alternatif untuk menciptakan suasana deliberatif. Deliberatif³ sendiri adalah suatu ide Habermas yang eksistensinya diwujudkan melalui ruang publik. Ruang publik dalam jaringan (daring/online) yang diniscayai sebagai ruang publik yang kekinian, yang memungkinkan adanya komunikasi langsung antar individu melalui piranti digital. Cable (2017, h.192) sepakat dengan pernyataan tersebut dengan mengatakan:

³ Tentang konsep deliberatif lebih lanjut dapat membaca F. Budi Hardiman (2009) berjudul “Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas”

“The advent of the internet radically changed protest politics and digital media access increased the intensity of communication, and altered the ways in which groups communicated with each other. The internet has served several useful purposes such as a convenient, cheap, research and publishing tool, where worldwide communication is used to inspire people to join unconventional actions, and as a site of virtual action” (Cable, 2017, h.192)

Untuk mewujudkan adanya interaksi antar individu dalam dunia maya (digital) yang terjamin, maka Habermas mengajukan prasyarat yang disebut sebagai tindakan komunikatif (*communicative action*) dalam ruang publik. Singkatnya, prasyarat tindakan komunikatif merupakan upaya Habermas untuk menemukan kesepahaman bersama (*mutual understanding*). Prasyarat *pertama* ia ingin lebih berkonsentrasi pada struktur kebahasaan yang bermain dalam ruang wacana publik. *Kedua*, menekankan adanya spektrum kesepahaman yang dicari oleh publik secara sadar dengan menggunakan aturan main fair dan setara. *Ketiga*, inklusivitas, dimaksudkan adalah adanya aturan diskursus publik yang ditentukan secara bersama.

Era digital telah menempatkan peran dunia maya sebagai saksi atas berkembangnya agenda gerakan sosial hari ini, mulai dari hal yang bersifat persuasif hingga konfrontatif, dan usaha individu hingga kolektif. Pengintegrasian interaksi dalam jejaring sosial melalui internet dan perantara digital lainnya ini telah membentuk aktivisme yang, tidak hanya bersifat politik tetapi juga non politik. Castells dalam Lim (2005, h.32) mengatakan

bahwa kemunculan piranti digital sejak akhir abad 20, khususnya internet, sangat pas dengan aspek struktural jejaring masyarakat (*networks society*) sebab dapat diadopsi dalam berbagai bidang sosial, termasuk membantu membangun pengekspresian dalam hubungan kekuasaan di masyarakat.

Lim pun melanjutkan, bahwa dengan internet, sebutnya, telah mengubah dinamika aktivisme sosial dalam berbagai lokus. Tentunya dari situ (internet, atau piranti digital lainnya) membantu munculnya wajah baru gerakan sosial kita. Scholz (2010, h.30) mengatakan jika ha ini bukan tanpa sebab, melainkan para aktivis telah menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya berhalusinasi masa depan yang lebih baik. Mereka perlu hadir di berbagai tempat yang dapat menjangkau orang-orang secara luas. Bahkan dengan medium baru tersebut, disinyalir menambah pola gerakan sosial. Meski disadari hal itu bukan solusi yang ajaib atas permasalahan gerakan, tetapi dalam hal lain juga membantu mereka dalam meonggarkan cengkraman rezim penguasa yang represif.

Argumen ini diperkuat oleh Lim (2014) bahwa pengorganisasian melalui daring memiliki kesempatan guna menjadi gerakan politik apabila para aktor menerapkan pendekatan budaya konsumsi yang kekinian. Adapun pendekatan tersebut yakni dengan pengemasan yang ringan, informasi yang padat agar mudah mendapat perhatian secara simpel, serta menampilkan gambaran visual yang mudah dipahami dan menampilkan sensasi untuk penerima suatu wacana. Sehingga dengan hal tersebut diharapkan akan mewujudkan *online social movement* di era digital secara baik.

1.5.2.1 Gerakan Sosial Mahasiswa di Era Digital

Mungkin bisa dikatakan bahwa era revolusi yang dipelopori mahasiswa telah berakhir sejak setengah abad yang lalu, tetapi mahasiswa tetap aktif dalam politik bahkan sering berperan sebagai kunci kekuatan dalam gerakan yang mengarah pada perubahan sosial, baik lingkup lokal maupun global. Mereka mungkin tidak lagi menjadi pusat gerakan, tetapi juga mereka kerap kali menjadi aktor yang sangat dibutuhkan guna membantu membentuk pesan, ideologi, maupun taktik gerakan protes (Altbach & Klemenčič, 2017, h.223). Di era sekarang, pergerakan mereka pun mulai keluar dari kekolotan gerak dengan mengkombinasikannya dengan teknologi digital. Dengan itu piranti digital bagi aktivisme mahasiswa telah menjadi faktor penting dalam menentukan keefektifitasan potensinya (Luescher & Mamashela, 2015, h.44).

Kombinasi antara gerakan sosial dan penggunaan teknologi digital ini telah disambut dengan baik oleh para aktor gerakan (baca: aktivis) sejak beberapa dekade kebelakang. Dalam penelitian Lim (2019) dalam konteks gerakan sosial mahasiswa di Indonesia misalnya, menyebutkan bahwa dalam masa krisis periode 1996 hingga 1998 penggunaan internet menjadi perantara utama sebagai wadah diskusi serta mengkritik rezim pemerintah. Dan hal tersebut berakhir pada keberhasilan menggalang gerakan yang anti terhadap Soeharto. Memang pada saat itu konteks penggunaan internet sebagai sebuah kombinasi antara aktivisme daring dan luring dan

belum ada (bahkan tidak ada) kontrol secara terbuka dari pemerintah. Sehingga, dengan menggunakan piranti digital seperti telpon, email, dan lain sebagainya, para mahasiswa dapat menggerakkan massa untuk turun jalan untuk memaksa Soeharto lengser. Bennett (dalam Tarrow, 2011, h.137) dalam hal ini menunjukkan bahwa kekuatan media digital telah mengubah sifat aktivisme dalam sebuah langkah terpenting, termasuk untuk meluaskan jangkauan sosial jaringan transnasional, mengurangi kebutuhan keorganisasian secara “offline” (baik lokal maupun nasional) sebagai basis gerakan, meningkatkan keuntungan berupa gerak yang lebih luas bagi organisasi yang kurang sumber daya, mempermudah hubungan, dan menggabungkan interaksi tatap muka dengan performa virtual.

Contoh pelengseran presiden Soeharto diatas merupakan satu dari banyak peristiwa gerakan mahasiswa yang sukses mengkombinasikan antara peran penggunaan piranti digital dan aktivisme kontemporer, dimana teknologi digital tersebut diposisikan sebagai katalisator semata. Dari pengkombinasian tersebut menunjukkan bahwa dengan segenap kuatnya dan partisipasi yang dihasilkan dari media digital, seperti media sosial, bukan sebagai pesan gerakan melainkan medium. Artinya, supaya suatu gerakan sosial yang dipelopori oleh mahasiswa berhasil diperlukan penggunaan piranti digital sebagai pembawa pesan, bahkan hingga jadi viral, hingga dapat menimbulkan dampak massal, terutama di kalangan para pemuda (Cabalin, 2014; Nofrima, dkk, 2020).

1.5.3 Kemandekan Gerakan Sosial di Era Digital

Kita kembali untuk mendudukan sebuah perdebatan teoritik. Memang klaim Jurgen Habermas bahwa komunikasi merupakan suatu aspek terpenting dalam kehidupan manusia merupakan hal yang bisa dibenarkan. Berdiskusi, mempertanyakan, berargumen, semua itu adalah fitrah sebagai manusia. Tanpa hal itu manusia akan terkungkung dalam jeratan hidup yang tak patut dihidupi⁴. Tetapi tampaknya ruang publik digital ini tidak lagi selaras dengan ideanya. Gerakan sosial berbasis digital mengalami kendala seperti halnya yang dikatakan oleh Cable (2017, h. 192) bahwa alih-alih menjadi organisasi protes, para aktivis gagal sepenuhnya memanfaatkan potensi internet secara efektif dan optimal. Sebab, komunikasi tatap muka digital telah mengisolasi kita di depan monitor dimana hal tersebut secara otomatis menjauhkan kita dari jalanan. Teknologi digital pun dalam gerakan telah menciptakan perbedaan yang terhubung dan yang tidak. Sehingga anggapan sebagai “komunitas virtual” ditolak olehnya karena lebih banyak merangarah ke hal negatif.

Bantahan ini pun sejalan dengan pandangan Michel Foucault (selanjutnya disebut Foucault), seorang filsuf Prancis, dengan analisa diskursusnya. Dalam diskursus wacana, Foucault melihat bahwa ruang publik digital tidaklah sedemikian idealnya. Melainkan merupakan sistem yang sebenarnya tidak bisa dinafikan dari kehadiran rezim pengetahuan yang selalu

⁴ Pernyataan ini sejalan dan diadopsi dari seorang filsuf Yunani, Socrates. Ia menyatakan bahwa “*the unexamined life is not worth living*” (kehidupan yang tidak dipertanyakan adalah kehidupan yang tak patut dihidupi)

mempunyai kepentingan di dalamnya. Bahkan tak canggung, untuk selalu tampil sebagai sosok yang benar, mereka melakukan subjektivikasi kepada individu lain dalam suatu diskursus (lihat kembali Gambar 1.4).

Foucault dalam Lim (2014b) mengatakan bahwa dalam suatu ruang publik, pengetahuan dan kekuasaan akan selalu terkait, dan “cukup sewenang-wenang untuk mencoba memisahkan praktik efektif kebebasan oleh orang-orang, yakni praktek hubungan sosial dan distribusi spasial di mana mereka berada. Jika mereka dipisahkan, mereka menjadi mustahil untuk dipahami”. Meski pernyataan tersebut tidak secara langsung mengaitkan dengan penggunaan teknologi digital, tapi kiranya dengan sebuah tafsiran bahwa praktik adanya pemisahan antara praktik hubungan sosial dan distribusi spasial merupakan kenyataan yang ditemui dari sebuah piranti digital. Media sosial, *teleconference*, pesan singkat, telpon, atau apapun itu memiliki implikasi adanya pemisahan ini, dimana implikasi lebih besarnya adalah mustahilnya saling memahami. Pandawangi (2019) pun menyatakan demikian bahwa “teknologi informasi adalah alat yang dapat memfasilitasi partisipasi aktivisme, tetapi juga menjadi alat kontrol perbedaan pendapat”

Apa yang dikatakan bahwa akan selalu ada kuasa (rezim pengetahuan) dalam suatu ruang diskursif digital (atau dalam istilah Habermas adalah ruang publik), maka kiranya kita perlu tahu apa sebenarnya makna dari “rezim pengetahuan”. Rezim pengetahuan disini merupakan gabungan dari dua konsep dalam pandangan Foucault, yakni pengetahuan dan rezim (kuasa). Penggabungan disini dimaksudkan untuk menyingkat dari

ungkapan Foucault dalam buku bertajuk *Discipline And Punish: The Birth of the Prison* bahwa:

*“power produces knowledge...that power and knowledge directly imply one another; that there is no power relation without the correlative constitution of a field of knowledge, nor any knowledge that does not presuppose and constitute at the same time power relations”*⁵ (Michel Foucault, 2019, tanpa halaman)

Ini merupakan keniscayaan, dimana pemikiran Foucault tersebut berangkat dari pemikiran pendahulunya, Frederick Nietzsche, yang mengatakan bahwa *“The will to know is the will to truth, the will to truth is will to power”* (dalam Gustomy, 2010, h.22). Diktum Nietzsche tersebut diadopsi oleh Foucault yang dengan diktum barunya *“knowledge is power”*. Hal tersebut bukan tanpa alasan namun melihat kenyataan bahwa setiap kuasa selalu berpretensi menghasilkan rezim kebenaran yang senantiasa disebarluaskan melalui wacana yang dibentuk oleh rezim kekuasaan.

Tentu dalam mencapai posisi kuasa bukanlah suatu yang kebetulan, melainkan dengan hasrat menjadi “yang benar” melalui proses strategi pendisiplinan (lihat Sheridan, 1980). Singkatnya, pendisiplinan adalah teknik khusus yang dilakukan oleh kuasa (rezim pengetahuan) dengan

⁵ Dari pernyataan ini juga kita dapat mengetahui bahwa makna dari kuasa bukan lah hal yang dipahami dari kebanyakan ilmuwan politik lainnya, dimana mereka mendefinisikannya secara umum bukan produk dari pengetahuan dalam ruang diskursus. Budiardjo (2008, h.17-18) misalnya, hanya mengartikan kuasa sebagai kemampuan orang untuk mempengaruhi seseorang dalam hal perilaku sesuai dengan kehendaknya. Hal ini tentu perlu diperhatikan kiranya untuk membedakan dan perlunya pendefinisian yang berbeda.

menargetkan perhatian kepada individu-individu sebagai objek dan pelaksanaan instrumen atas sebuah wacana. Sebab, menurut Foucault dalam Hoffman (2011, tanpa halaman) “*what is essential in all power is that ultimately its point of application is always the body*” (apa yang menjadi esensi dari segala kuasa pada akhirnya poin penerapannya selalu mengarah pada kontrol individu).

Dengan itu semua, maka kuasa akan memapankan posisinya sebagai kuasa serta memenangkan wacana. Ditambah, dari pendisiplinan ini akan memunculkan sebuah efek, yakni efek panoptik. Pandangan Foucault ini adalah penyelarasan pikirannya dengan pendahulunya, Jeremy Bentham, dimana efek ini menimbulkan perasaan cemas dan adanya pengawasan dari sosok kuasa bilamana tidak mengikuti dan melenceng dari sebuah wacana yang diproduksi.

“Panopticon...is the diagram of a mechanism of power reduced to its ideal form; its functioning, abstracted from any obstacle, resistance or friction, must be represented as a pure architectural and optical system: it is in fact a figure of political technology that may and must be detached from any specific use.”

(Foucault, 2019, tanpa halaman)

Bagi Baudrillard, selain relasi kuasa, konsumsi pun menjadi faktor utama yang membentuk kondisi sosial manusia. Hal tersebut kemudian memunculkan diktum baru “*mode of consumption*” sebagai kritik diktum sebelumnya, yakni “*mode of production*”. Cara kerjanya tidak hanya

membentuk kontrol atas sistem konsumsi, tetapi juga melalui eksploitasi dengan membangun perilaku segenap individu yang konsumtif. Dengan cara itu konsumsi bukan lagi sebuah komoditas melainkan dipahami sebagai tanda (*sign*). Sehingga tidak ada lagi definisi komoditas sesuai dengan kegunaanya, melainkan sebuah makna penanda yang dimaknai oleh sang pelaku itu sendiri, inilah yang selanjutnya disebut sebagai simulakra (Suyanto, 2017, P.140).

Secara sederhana simulakra yakni bentuk konstruksi imajiner dari sebuah realitas. Setidaknya terdapat tiga tujuan dari simulakra, yakni: pertama, mengontrol manusia dengan cara menjebak mereka bahwa simulasi itu nyata. Kedua, membuat orang ketergantungan pada simulasi dan tidak bisa hidup tanpanya. Ketiga, mempengaruhi orang-orang dalam bawah sadar. Sehingga dari simulakra ini setidaknya dapat menganalisa penyebab-penyebab munculnya dampak terparah dari simulakra, yakni hilangnya ruang publik. Setidaknya Baudrillard melihat dampak ini sebab dari adanya ekstasi komunikasi, dan ia menamai ini sebagai era “*the end of social life*”.

Kiranya Pierre Bourdieu mempunyai pemikiran yang penting untuk jalan keluar dari krisis ini. Buah pemikiran ini ia sebut sebagai “praktik sosial”. Bourdieu (2013, P.72) mengatakan bahwa praktik sosial adalah “*dialectic of the internalization of externality and the externalization of internality*” (dialektika dari internalisasi eksternalitas dan eksternalisasi internalitas). Secara singkat, habitus adalah nilai sosial yang dihayati individu dan membentuk perspektif dan paradigma.

Praktik sosial ini akan melahirkan apa yang disebut dominasi simbolik⁶, yakni penguasaan terhadap seseorang dengan menggunakan simbol-simbol. Sebab dominasi disini tidak selalu dimaknai dengan negatif, melainkan netral, tergantung bagaimana aktor yang dominan tersebut membangun makna. Sejalan dengan hal ini, Foucault (dalam Danaher, dkk, 2020) pun menyatakan hal yang persis sebagaimana berikut:

“After all, while the Enlightenment ideals wanted to free people from domination and control, the knowledge and technologies associated with what Foucault calls ‘biopower’ wanted to do the exact opposite—to control, regulate and dominate people, to make them ‘docile bodies’” (Bagaimanapun, sementara cita-cita pencerahan dengan keinginan membebaskan orang dari dominasi dan kendali, pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan apa yang disebut Foucault sebagai 'biopower' ingin melakukan kebalikannya — untuk mengontrol, mengatur, dan mendominasi kembali orang, dan menjadikan mereka 'tubuh yang jinak') (Danaher, etc, 2020, h.66)

1. 6 Definisi Konsep

Setelah kita mendudukan kerangka pemikiran teoritis sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kiranya perlu dibumikan melalui pendefinisian sesuai dengan kebutuhan analisa yang akan digunakan nanti. Setidaknya akan dipaparkan beberapa definisi konsep antara lain yakni: gerakan sosial, gerakan sosial dan era digital, dan mandeknya gerakan sosial di era digita

⁶ Istilah yang kurang lebih mirip dengan definisi kuasa yang dicanangkan Foucault, yakni membangun ulang dominasi dalam ruang wacana yang dapat mengubah wajah baru gerakan sosial atas kemandekan

1.6.1 Gerakan Sosial

Gerakan sosial merupakan suatu kumpulan individu, kelompok, maupun organisasi yang terkonstruksi dari visi dan identitas bersama. Tujuannya adalah guna membentuk perubahan sesuai dengan keberpihakan dan tujuannya melalui penggunaan serangkaian strategi. Tangga yang menjadi jalan menuju terbentuknya gerakan disebut pengorganisasian, dimana di dalamnya ada serangkaian proses diskursus. Hal itu diharapkan dapat memperoleh hasil yang memuaskan berupa solidaritas gerakan, yang terdiri dari komponen, seperti: identitas bersama, penguatan narasi, dan kerja perasaan. Adapun komponen ini harus tersusun dengan rapi, sebab gerakan sosial harus siap berhadapan selalu dengan proses diskursus dan lingkaran pertarungan (*cycle of contention*) dimana posisi mereka akan selalu diuji dan terbaru logikanya sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi.

1.6.2 Gerakan Sosial dan Era Digital

Antara gerakan sosial dan era digital kini menemukan logika (nalar) baru yang dinamakan *connective action*. Logika tersebut merupakan sintesa dari penggunaan teknologi digital dan logika gerakan sebelumnya (aksi kolektif). Logika baru tersebut diharapkan dapat mewujudkan alternatif (jalan lain gerakan) dan suasana deliberatif dimana logika gerakan yang lama tidak mampu lagi menghadapi perubahan zaman. Hal ini didasari dari kesadaran para aktivis gerakan yang mereka tidak bisa berada dalam kemelut pola gerakan, tetapi harus menyelaraskan logikanya dengan serba-serbi

digital. Kesadaran ini harus tertanam secara jelas oleh semua aktor gerakan, khususnya mahasiswa, dimana mereka adalah simpul utama dalam agenda perubahan. Mereka dapat menjalankan logika ini jika terdapat penggabungan antara aktivisme “*online*” dan aktivisme “*offline*” sekaligus, bukan hanya salah satu saja.

1.6.3 Mandeknya Gerakan Sosial di Era Digital

Kemandekan gerakan sosial di era digital disebabkan komunikasi (baca: ruang publik) yang buruk. Kemungkinan besar buruknya komunikasi ini didasari dua faktor, yakni relasi kuasa dan konsumsi individu. Faktor relasi kuasa meniscayai akan hadirnya penguasaan oleh rezim pengetahuan. Sebab, dalam produksi wacana oleh rezim pengetahuan selalu berpretensi pada penguasaan. Tidak melalui upaya fisik, tetapi melalui pendisiplinan dengan regulasi dan normalisasi oleh rezim pengetahuan dengan segala intrumennya. Dalam relasi ini, implikasi bungkamnya individu akan terjadi dikarenakan mereka merasa “diawasi” (baca: panoptik) oleh rezim pengetahuan. Mereka yang resisten adalah mereka individu-individu akan mencoba untuk melawan sebuah wacana yang dominan. Faktor konsumsi individu yang berbeda dengan selera rezim pengetahuan pun dapat dicurigai sebagai pangkal dari kemandekan ini. Singkatnya, simulakra telah mencengram individu gerakan pada pola konsumsi yang tidak lagi harmonis dengan yang disodorkan oleh rezim pengetahuan. Praksis sosial yang baik harusnya dapat menjadi jembatan, yakni medealektikan antara seorang individu dari segi budaya

konsumsinya dengan praktik kuasa rezim pengetahuan (antara habitus dengan area).

1. 7 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan penjabaran analisa menggunakan suatu perangkat kerja khusus. Tentu penelitian kualitatif membutuhkan paradigma untuk membuka celah pertanyaan seperti apa yang diinginkan dalam sebuah penelitian (Neuman, 2002, h.20). Adapun paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivis dimana paradigma ini berasumsi bahwa adanya pencarian pemahaman dari suatu cakupan. Hal itu akan membantu untuk menemukan makna subjektif dari pengalaman-pengalaman. Tujuannya yakni mendapat sebanyak mungkin pandangan orang-orang tentang situasi yang hendak dipahami (Creswell, 2009, h.8).

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yakni bertujuan untuk menggambarkan suatu permasalahan yang bersandar pada pengungkapan fakta dari lingkup diskursus secara nyata dari apa yang diamati dan yang dideskripsikan sendiri (Suteki & Taufani, 2018, h.133).

1.6.2 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini tidak menggunakan tipe hubungan subjek-objek yang sifatnya teknis antara peneliti dan yang diteliti. Tentu tidak

menyalahi aturan penelitian, sebab bukannya tidak mungkin untuk menggunakan tipe hubungan yang lain. Sebab, analisa diskursus membuka kesempatan untuk peneliti ikut membersamai yang diteliti. Ini sejalan dengan defisi posisi subjek sebagaimana dikemukakan Andersen (2003), bahwa:

“Posisi subjek adalah ruang dari mana seseorang berbicara dan mengamati dalam formasi diskursif. Posisi subjek memiliki aturan untuk penerimaan individu tertentu ke dalam ruang, aturan untuk penerimaan mengenai dalam situasi apa posisi subjek dapat digunakan sebagai platform untuk berbicara dan mengamati, dan aturan untuk pembentukan pernyataan setelah seseorang mengambil posisi tertentu”. (Åkerstrøm Andersen, 2003, h.viii)

Pola hubungan, yang kemudian disebut intersubjektif inilah yang digunakan dalam penelitian ini, yakni menjadi seorang peneliti sekaligus orang yang terlibat dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kota Semarang.

1.6.3 Jenis Data

Tidak ada dikotomi primer sekunder. Sebab dalam strategi analisis menganggap bahwa semua data sama pentingnya, sama-sama merupakan data primer, baik hasil penelusuran pribadi, wawancara, observasi, dokumen arsip, atau bahkan literatur sekalipun. Jika telah terkumpul data-data tersebut, maka dilakukan proses reduksi data sesuai dengan kadar kebutuhan peneliti.

1.6.4 Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini yakni berdasarkan pengalaman peneliti pada organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kota semarang.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni dengan mengumpulkan data melalui pengamatan, wawancara, dan pengumpulan arsip-arsip yang dapat menunjukkan makna untuk penelitian ini. Penggunaan paradigma konstruktivis disini dimasukan guna membantu peneliti untuk tidak melakukan penyempitan atas pertanyaan-pertanyaan terhadap sesuatu yang sedang diteliti. Sehingga pertanyaan demi pertanyaan yang muncul bersifat luas dan umum yang menimbulkan makna suatu situasi dapat terbangun melalui suatu ruang diskursus. Creswell (2009, h.8) pun menilai dengan adanya inklusivitas pertanyaan, seperti halnya dalam paradigma konstruktivis ini, maka akan semakin baik kualitas penelitian dalam mendapat data. Sebab, dalam hal ini peneliti dapat mendengarkan secara seksama apa yang dikatakan orang dalam pengalaman hidupnya.

Adapun cara menentukan narasumber untuk diwawancari yakni melalui penelusuran atas mereka yang dianggap sebagai rezim pengetahuan, dalam hal ini adalah pimpinan cabang kota semarang, serta memiliki otoritas untuk mengemukakan argumen yakni: ketua IMM cabang Kota Semarang, dan ketua bidang Hikmah IMM cabang Kota Semarang. Adapun beberapa narasumber lainnya adalah ditentukan dari mereka yang kiranya dalam pengorganisasian gerakan secara daring mengalami subjektivikasi dalam

pengamatan peneliti selama ini, mereka adalah Muhammad Bangkit Priyambodo (ketua bidang Hikmah PK IMM Ibnu Sina Undip), Abdullah Azzam (ketua bidang Hikmah PK IMM Sayf Battar UIN Walisongo), dan Gadis (sosok yang bungkam dalam salah satu agenda pengorganisasian daring). Sedangkan untuk menelusuri dokumen atau arsip, peneliti mengais berkas demi berkas tersebut melalui arsip yang dimiliki oleh personal narasumber maupun institusi PC IMM Kota Semarang.

1.6.6 Analisa dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini perangkat kerja yang akan digunakan untuk menganalisa adalah analisa wacana kritis. Terdapat dua pendekatan, yakni arkeologi dan genealogi. Antara pendekatan arkeologi dan genealogi bukanlah suatu yang dapat dilepaskan satu sama lain, melainkan satu kesatuan dalam konstelasi metode. Permisalan dua pendekatan ini dikatakan oleh Gustomy (2010) ibarat seperti batu bata dan semen, tidak mungkin untuk membangun bangunan dua aspek ini dipisahkan. Arkeologi sendiri adalah sebuah upaya penggalian sebuah makna dengan membandingkan sebuah periode. Sedangkan, pendekatan yang digunakan oleh Foucault disebut juga sebagai pendekatan genealogi ini merupakan kelanjutan dari pendekatan arkeologi, dimana pendekatan ini berusaha menyingkap tidak hanya memperbandingkan wacana secara historis melainkan juga dengan menyingkap variabel-variabel tersembunyi, motif-motif, dan sebab musebab terjadinya perbedaan makna dari setiap diskursus wacana. Dari pendekatan tersebutlah melihat adanya faktor utama dalam pembentuk kuasa, yakni

pengetahuan. Sehingga muncul lah diktum “*knowladge is power*”, yang memiliki arti bahwa kekuasaan selalu terartikulasi dari pengetahuan, dan pengetahuan itu pun selalu mempunyai efek kuasa. Setidaknya dengan perangkat analisa wacana kritis, terdapat langkah-langkah yang diambil setelah seleksi topik, yakni pendalaman terhadap tema, identifikasi tema, pencarian unsur-unsur wacana yang absen atau tersembunyi dalam suatu diskursus, lalu mengkontekstualisasikan unsur wacana dalam jejaring atau relasi kuasa dan pengetahuan (Alba-Juez, 2009, h.216).